

Judul : Antisipasi Perang Hibrida : Nuning : Waspadai Fenomena Post-Truth
Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Antisipasi Perang Hibrida Nuning: Waspadai Fenomena Post-Truth



Susaningtyas Kertopati

PEPERANGAN di masa depan akan sangat tergantung pada teknologi perang siber dan elektronika. Ancaman perang hibrida ini perlu diantisipasi mengingat serangan terhadap perangkat lunak, *cyber warfare* dan aspek psikologis semakin nyata.

Ancaman tersebut terungkap dalam Seminar Akhir Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-61 Tahun Akademik 2023, di Auditorium Gedung Yos Soedarso, Mako Seskoal, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Kertopati mengatakan, pendekatan peperangan hibrida berfokus pada mengendalikan dan memengaruhi populasi di dalam suatu negara dibandingkan dengan okupasi secara teritorial.

Untuk itu, tema seperti perang sipil, separatisme, pemberontakan, terorisme dan kelompok gerilyawan menjadi sentral.

Nuning-sapaan akrab Susaningtyas, menjelaskan, berbeda dengan peperangan konvensional atau tradisional yang berfokus untuk mengalahkan kekuatan militer suatu negara dan mengisolasi masyarakat sipil dari perang, peperangan hibrida cenderung berfokus untuk memengaruhi populasi suatu negara.

Peperangan ini bertujuan mendapatkan atau mengikis dukungan masyarakat terhadap suatu pemerintahan, serta meningkatkan atau membuat

tidak relevan penggunaan kekuatan militer.

Atas hal itu, perang hibrida seringkali digambarkan sebagai *population-centric conflict*, karena yang menjadi target adalah menciptakan konflik dalam populasi suatu negara yang berujung pada instabilitas keamanan nasional suatu negara.

"Fenomena *post-truth* politik di sosial media yang mengancam demokrasi hingga dapat bereskalasi mengganggu stabilitas keamanan nasional," ujar Nuning.

Mantan anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, *post-truth* merupakan sebuah kondisi ketika fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal.

Kondisi *post-truth* mendapat tempat dalam momentum politik untuk memperkuat sebuah narasi propaganda.

"Dalam hal ini, seobjektif apa pun sebuah informasi, jika tidak memenuhi harapan emosional sebagian golongan publik, maka akan disingkirkan (*truth decay*)," terangnya.

Pengamat militer dan intelijen ini menyebut, di Indonesia, *post-truth* politik berkelindan dengan politik identitas, khususnya sentimen agama dan etnis. Hal ini berpotensi bereskalasi, sehingga mengancam stabilitas keamanan nasional.

Hadir dalam seminar yang mengangkat tema "Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Menghadapi Ancaman Hibrida Dalam Rangka Mewujudkan Kepentingan Nasional di Laut" antara lain, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai keynote speaker, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.

Kemudian, Asintel KSAL Mayjen TNI Mar Suaf Yanu Hardani, Kakordos Seskoal Laksamana Pertama TNI Judijanto, Akademisi Bidang Teknologi Informasi Onno W Purbo. Selain itu, hadir pula pembicara dari TNI, Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61 yaitu Mayor Laut (T) Cahya Kusuma, Kopol Marthinus, dan Letkol Aaron Koh. ■ **USU**